



## Studi Komparatif Tingkat Perkembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Bengkalis

Kingkin Aji Harimurti<sup>1,2\*</sup>, Lutfhi Mutha'ali<sup>3</sup>, Andri Kurniawan<sup>4</sup>

<sup>1,3-4</sup>Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia

<sup>2</sup>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: kingkinajiharimurti@mail.ugm.ac.id

Diterima: 07-10-2024

Disetujui: 26-11-2024

---

---

### Abstrak

Desentralisasi menguatkan kembali paradigma pembangunan berdasarkan karakteristik geografis wilayah (*endogenous development*). Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten dengan bentuk wilayah yang bervariasi sehingga perlu dikaji perbedaan tingkat perkembangan berdasarkan karakteristik geografisnya. Indeks komposit dan analisis diskriminan digunakan untuk mengkaji perbedaan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat perkembangan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis dominan rendah 65,81%, sedang 19,35% dan tinggi 14,84%. Tingkat perkembangan daerah dataran lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pesisir, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan jumlah layanan operator selular yang dapat menjangkau adalah variabel-variabel penentu perbedaan perkembangan wilayah di Kabupaten Bengkalis.

**Kata Kunci:** karakteristik geografis, perkembangan wilayah, faktor-faktor

### Abstract

Decentralization has reinforced the development paradigm based on the geographical characteristics of the region (*endogenous development*). Bengkalis Regency is one of the regencies with varied regional shapes, so it is necessary to study the disparity in development levels based on their geographical characteristics. Composite index and discriminant analysis were used to examine the disparity and factors that determine the level of regional development. The results showed that the level of development of rural areas in Bengkalis Regency was predominantly low 62.58%, medium 23.23% and high 14.19%. The level of development of the plain area is higher than that of the coastal area, Bengkalis Island and Rupa Island. Population growth, population density and the number of cellular operator services that can reach are the variables that determine disparity in regional development in Bengkalis Regency.

**Keywords:** geographical characteristics, regional development, factors

---

---

## Pendahuluan

Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik mendorong adanya perubahan cara pandang dalam proses perencanaan pembangunan wilayah. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah dapat secara mandiri dalam menggali pembiayaan, mengalokasikan dan menetapkan prioritas pembangunan (Amin 2015) . Di bidang studi kebijakan regional, era desentralisasi ini menguatkan kembali pentingnya pendekatan berbasis wilayah sebagai upaya untuk mengelola pembangunan (Clelland 2022; Murray 2024; Pascariu, Kourtit, and Tiganasu 2020; Tomaney 2014). Wilayah dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu wilayah subjektif dan objektif. Wilayah subjektif didasarkan pada kriteria tertentu, sedangkan wilayah objektif dilihat dari karakteristik geografis yang membedakan dengan wilayah lain. Perbedaan karakteristik wilayah ini yang menjadi isu penting dalam penelitian geografi pembangunan (Deng et al. 2022).

Salah satu fitur dasar geografi untuk memahami karakteristik wilayah adalah perwilayahan/regionalisasi (Feng et al. 2024). Perwilayahan ialah upaya mengelompokkan wilayah kecil berdasarkan tujuan tertentu. Perwilayahan dapat didasarkan pada wilayah administratif, kesamaan kondisi (*homogeneity*), pengaruh ekonomi, maupun perencanaan program (Ridwan and Baso 2017). Perbedaan wilayah merupakan ciri utama dalam menggambarkan distribusi atau variasi berbagai elemen yang bekerja dalam wilayah tersebut (Deng et al. 2022). Perwilayahan berdasarkan karakter geografi merupakan salah satu cara untuk memudahkan analisis perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan karakteristik dan perkembangannya (Muta'ali 2015).

Perbedaan karakteristik wilayah mengakibatkan terjadinya kesenjangan perkembangan wilayah. Kesenjangan wilayah ialah salah satu masalah utama dalam kajian ilmu wilayah (Qin et al. 2023; Wang et al. 2012). Kesenjangan wilayah disebabkan oleh berbagai faktor yang bekerja dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah (Panca Kurniasih 2015). Faktor sosial, pendapatan dan keragaman aktivitas ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya kesenjangan wilayah (Syafrizal 2012). Sejumlah faktor lainnya yang

dapat menyebabkan perbedaan kemajuan antar wilayah diantaranya ialah perbedaan potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi demografi dan ketenagakerjaan serta adanya mobilitas yang tidak lancar diantara daerah sehingga menyebabkan adanya daerah tertinggal dan daerah maju (Wei 2015).

Terdapat dua sudut pandang dalam melihat terjadinya ketimpangan pembangunan yaitu secara konvergen dan divergen. Teori neoklasik dan model U terbalik merupakan dua model teori konvergen. Teori neoklasik menyatakan bahwa proses ketimpangan merupakan hal yang wajar terjadi diawal proses pembangunan dan seiring waktu akan mencapai keseimbangan (Syafriзал 2012). Hal ini didukung dengan teori U terbalik yang menyatakan bahwa kesenjangan meningkat pada tahap awal pembangunan dan akan menurun seiring dengan perkembangan perekonomiannya. Teori divergen justru melihat sebaliknya dimana fenomena ketimpangan terjadi karena proses akumulasi yang lama sehingga menyebabkan kesenjangan antar wilayah. Para ahli geografi melihat ketimpangan wilayah bukan hanya dari sisi bagaimana upaya mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi namun secara khusus juga melihat dari aspek keruangannya.

Proses perkembangan wilayah era saat ini menekankan bahwa konsep perkembangan wilayah lebih bersifat multidimensi (Artelaris 2022). Perkembangan wilayah ialah integrasi antara fungsi lingkungan, penduduk, kegiatan ekonomi maupun sosial yang saling berinteraksi (Budiharjo 1995). Menurut Kuncoro (2002) perkembangan wilayah ialah proses berkembangnya wilayah menjadi lebih baik dari sisi fisik, sosial, ekonomi maupun budaya. Muta'ali (2015) menekankan bahwa tingkat perkembangan wilayah merupakan suatu proses perwilayahan berdasarkan keseragaman (homogenitas) dari potensi dan karakteristik wilayah dengan tidak melupakan faktor sosial ekonomi dan dimensi lainnya.

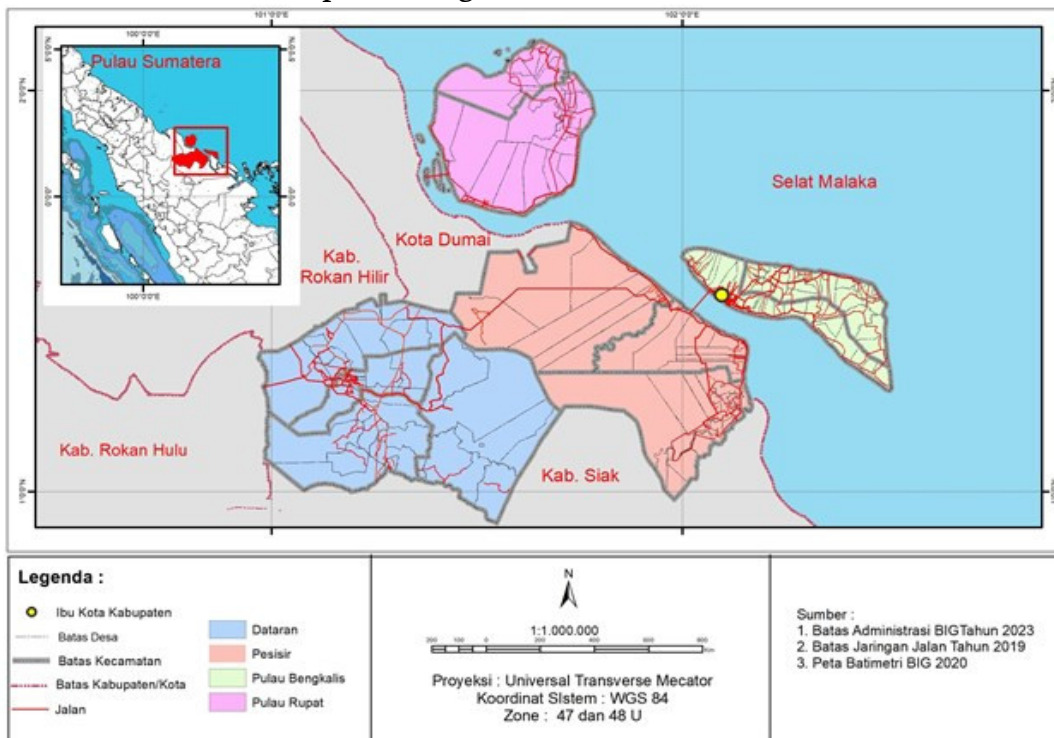
Secara teoritik terdapat berbagai ragam indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat perkembangan wilayah sesuai dengan tujuan dan unit analisisnya. Tidak ada standar baku dalam menilai tingkat perkembangan wilayah. Kementerian Daerah Tertinggal (KPDT) menggunakan enam aspek kriteria dalam melihat satatus desa tertinggal atau tidak yaitu perekonomian

masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana/infrastuktur, kemampuan keuangan lokal serta karakteristik daerah. (BPS 2011) menyusun indeks pembangunan regional (IPR) dalam lingkup kabupaten mencakup dimensi ekonomi, sosial, infrastuktur, pelayanan publik, lingkungan dan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesenjangan perkembangan wilayah sangat sensitif terhadap skala geografis seperti yang dikuatkan oleh berbagai analisis di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (Latifah 2018; Noviyanti, Emma Pravitasari, and Sahara 2020; Rosmeli and Nurhayani 2014; Wenda, Tambas, and R. Rengkung 2023), akan tetapi belum banyak penelitian yang mengkaji dalam unit skala desa yang dikaitkan dengan perbedaan kondisi fisik wilayah. Maka dari itu makalah ini secara khusus menganalisis perbedaan tingkat perkembangan wilayah di tingkat desa beserta faktor-faktor yang menentukan perkembangannya dengan basis analisis berdasarkan variasi karakteristik geografis di Kabupaten Bengkalis.

## Metode

Gambar 1  
Lokasi Penelitian Kabupaten Bengkalis



Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan unit analisis desa. Perwilayah berdasarkan karakteristik geografis dilakukan sebagai basis analisis, secara rinci terlihat dalam Gambar 1. Data utama yang digunakan adalah data PODES dan Kecamatan dalam angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Adapun variabel penelitian secara rinci di Tabel 1.

Tabel 1  
Variabel Penelitian

No	Dimensi	Variabel
1	Kependudukan	Kepadatan penduduk Pertumbuhan penduduk
2	Fasilitas Pelayanan	Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, PT sederajat) Kesehatan (RS, Puskesmas, Praktek Dokter, Poskesdes, Polindes, Apotik, Posyandu, Bidan Desa)
3	Ekonomi	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah sarana ekonomi (Toko, Pasar, Minimarket, Restoran, Warung, Hotel, Penginapan)
4	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler

Standardisasi Data

Penyusunan indeks pada dasarnya merupakan penggabungan dari berbagai macam dimensi atau indikator sehingga diperlukan teknik standarisasi data (penyamaan satuan ukuran). Adapun teknik standarisasi dalam penelitian ini menggunakan teknik penskalaan (*scaling*) yaitu menyamakan satuan dari berbagai indikator dengan memposisikan nilai variabel terhadap nilai tertinggi dan terendah.

Adapun formulanya adalah sebagai berikut :

$$S = \frac{(R - R_r)}{(R_t - R_r)} \times 100$$

Keterangan:

S = Nilai skala

R = Data mentah dari pengamatan yang diskalakan

R<sub>t</sub> = Data mentah tertinggi dari pengamatan

R<sub>r</sub> = Data mentah terendah dari pengamatan

Penyusunan Indeks Komposit Perkembangan Wilayah

Langkah ini merupakan penjumlahan dari nilai-nilai indikator atau variabel yang sudah terstandarisasi. Sehingga dapat diperoleh nilai indeks perkembangan wilayah. Berikut ilustrasi penyusunan indeks perkembangan wilayah

$$IPW = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

Keterangan:

IPW = Indeks Perkembangan Wilayah

$X_1..X_n$  = Indikator perkembangan wilayah (terstandarisasi)

Pengklasifikasian Tingkat Perkembangan Wilayah

Penentuan klasifikasi tingkat perkembangan wilayah didasarkan pada metode standar deviasi berdasarkan nilai dari indeks komposit perkembangan wilayah. Sehingga diperoleh tingkat perkembangan tinggi, sedang, dan rendah. Adapun rumus klasifikasi adalah sebagai berikut :

Kelas I (Tinggi) =  $\geq r + sd$

Kelas II (Sedang) =  $> r + sd - \leq r$

Kelas III (Rendah) =  $< r$

Keterangan:

$r$  = nilai rata-rata

$sd$  = nilai standar deviasi

Analisis Diskriminant

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan tingkat perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan karakteristik geografis. Pertimbangan penggunaan analisis ini karena jenis variabel independent (X) yang bersifat interval/rasio sedangkan variabel dependennya (Y) kategori (Hair et al. 2013). *Stepwise statistics tabel variabel entered/removed* digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menentukan secara signifikan perbedaan perkembangan wilayah berdasarkan karakteristik geografis. Gambar *canonical discriminant functions* digunakan untuk melihat distribusi karakteristik persebaran perkembangan wilayahnya.

## Hasil dan Pembahasan

Untuk menilai tingkat perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan karakteristik geografis digunakan empat dimensi yaitu dimensi kependudukan, dimensi infrastruktur, dimensi ekonomi dan dimensi

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perhitungan tingkat perkembangan wilayah dilakukan dengan mengukur indeks disetiap dimensi yang kemudian nilai dari setiap indeks dijumlahkan menjadi indeks komposit tingkat perkembangan wilayah (IPW). Adapun analisis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari masing-masing dimensi maupun indeks komposit (IPW) yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

**Dimensi Kependudukan**

Kepadatan dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat perkembangan wilayah. Sebagaimana wilayah-wilayah dengan tingkat perkembangan relatif tinggi cenderung memiliki tingkat kepadatan dan pertumbuhan yang tinggi.

Tabel 2  
Klasifikasi Variabel Dimensi Kependudukan Kabupaten Bengkulu

Variabel Dimensi Kependudukan	Dataran		Pesisir		Pulau Bengkulu		Pulau Rupa		Total	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
<b>Kepadatan Penduduk</b>										
Tinggi ≥ 1981 (Jiwa/Km2)	8	18.60	0	0.00	4	7.41	0	0.00	12	7.74
Sedang ≥ 522- < 1981 (Jiwa/Km2)	4	9.30	0	0.00	3	5.56	0	0.00	7	4.52
Rendah < 522 (Jiwa/Km2)	31	72.09	34	100	47	87.04	24	100	136	87.74
<b>Pertumbuhan Penduduk</b>										
Tinggi ≥ 5.99%	17	39.53	1	2.94	1	1.85	0	0.00	19	12.26
Sedang ≥ 2.52% - < 5.99%	18	41.86	1	2.94	1	1.85	4	16.67	24	15.48
Rendah < 2.52%	8	18.60	32	94.12	52	96.30	20	83.33	112	72.26
Total	43	100	34	100	54	100	24	100	155	100

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa 87,74% tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu rendah dengan tingkat kepadatan penduduk < 522 Jiwa/Km2, sedangkan hanya 12 desa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi atau sebesar 7,74%. Dilihat dari distribusi persebarannya desa-desa dengan tingkat kepadatan tinggi berada di daerah dataran berjumlah 8 desa, sedangkan 4 desa di daerah Pulau Bengkulu. Dataran relatif memiliki kepadatan tinggi karena wilayahnya memiliki sumberdaya minyak bumi (pusat ekonomi) sehingga dapat menjadi faktor penarik penduduk. Sedangkan faktor penarik di Pulau Bengkulu karena merupakan ibu kota Kabupaten Bengkulu

(pusat pelayanan). Dari klasifikasi pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah sebesar 72,26%. Distribusi persebaran tingkat pertumbuhan penduduk juga masih berada di wilayah dataran sedangkan wilayah lainnya cenderung dominan rendah.

#### Dimensi Fasilitas Pelayanan

Kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas pelayanan yang paling dasar adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah dengan persentase 61,94%. Persebaran fasilitas pelayanan pendidikan masih terpusat di daerah dataran dan Pulau Bengkalis sedangkan untuk ketersediaan fasilitas pendidikan di Pulau Rupat dan daerah pesisir masih tergolong rendah. Untuk ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis juga masih tergolong rendah 67,10% yang masih terpusat di desa-desa yang berada di daerah dataran. Peningkatan penyediaan pelayanan dasar khususnya untuk daerah pesisir, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat diharapkan mampu untuk mendorong peningkatan tingkat perkembangan wilayah pada dimensi fasilitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat pada ketiga wilayah.

Tabel 3.

#### Klasifikasi Variabel Fasilitas Pelayanan Kabupaten Bengkalis

Variabel Dimensi Fasilitas Pelayanan	Dataran		Pesisir		Pulau Bengkalis		Pulau Rupat		Total	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
<b>Fasilitas Pendidikan</b>										
Tinggi $\geq 12$ Unit	12	27.91	1	2.94	3	5.56	0	0.00	16	10.32
Sedang $\geq 6 - < 12$ Unit	20	46.51	5	14.71	8	14.81	10	41.67	43	27.74
Rendah $< 6$ Unit	11	25.58	28	82.35	43	79.63	14	58.33	96	61.94
<b>Fasilitas Kesehatan</b>										
Tinggi $\geq 15$ Unit	17	39.53	2	5.88	5	9.26	0	0.00	24	15.48
Sedang $\geq 9 - < 15$ Unit	15	34.88	3	8.82	5	9.26	4	16.67	27	17.42
Rendah $< 9$ Unit	11	25.58	29	85.29	44	81.48	20	83.33	104	67.10
Total	43	100	34	100	54	100	24	100	155	100



## Dimensi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Bengkalis masih sangat tergantung pada sektor migas dengan kontribusi PDRB terbesar yaitu sebesar 63,15% dari total PDRB (BPS 2023). Sektor-sektor selain migas belum menunjukkan kontribusinya secara signifikan sehingga diharapkan muncul alternatif sektor ekonomi lain yang dapat mendukung perekonomian Kabupaten Bengkalis khususnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Industri mikro kecil merupakan salah satu alternatif yang dapat mendorong perkembangan ekonomi khususnya pada level mikro. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi juga dapat menentukan bagaimana tingkat perkembangan wilayahnya. Dengan semakin banyak jumlah industri mikro kecil dan sarana prasarana ekonominya maka diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian wilayah.

Tabel 4.

Klasifikasi Variabel Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Variabel Dimensi Ekonomi	Dataran		Pesisir		Pulau Bengkalis		Pulau Rupat		Total	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
<b>Industri Mikro dan Kecil</b>										
Tinggi $\geq$ 55 Unit	6	13.95	3	8.82	3	5.56	1	4.17	13	8.39
Sedang $\geq$ 22 - < 55 Unit	13	30.23	3	8.82	11	20.37	4	16.67	31	20.00
Rendah < 22 Unit	24	55.81	28	82.35	40	74.07	19	79.17	111	71.61
<b>Sarana Prasarana Ekonomi</b>										
Tinggi $\geq$ 119 Unit	8	18.60	2	5.88	3	5.56	0	0.00	13	8.39
Sedang $\geq$ 49 - < 119 Unit	18	41.86	2	5.88	7	12.96	2	8.33	29	18.71
Rendah < 49 Unit	17	39.53	30	88.24	44	81.48	22	91.67	113	72.90
Total	43	100	34	100	54	100	24	100	155	100

Dimensi ekonomi menggunakan dua variabel dalam menilai tingkat perkembangan wilayahnya yaitu jumlah industri mikro kecil dan jumlah sarana prasarana ekonomi. Dari Tabel 4 hasil klasifikasi menunjukkan bahwa mayoritas ketersediaan jumlah usaha mikro kecil di Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah sebesar 71,61%. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi juga masih tergolong rendah 72,90%. Secara distribusinya jumlah industri mikro kecil dan sarana prasarana ekonomi masih terpusat

didaerah dataran. Sementara untuk daerah perdesaan yang berada di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan Pesisir masih tergolong rendah.

Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Era modern saat ini mendorong setiap desa untuk dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan internet merupakan syarat dasar untuk mempermudah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan dalam mengakses TIK dapat mendorong tingkat perkembangan desa menjadi lebih berkembang. Dimensi TIK menggunakan dua variabel dalam mengukur tingkat perkembangan wilayahnya yaitu jumlah BTS dan layanan operator yang menjangkau, dimana semakin tinggi jumlah BTS dan operator maka semakin berkembang wilayah perdesaannya.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa ketersediaan BTS di desa-desa yang berada di Kabupaten Bengkalis masih rendah di bawah <3 BTS yaitu 72,90%. Sedangkan jumlah layanan operator relatif lebih baik dibandingkan dengan ketersediaan jumlah BTS meskipun juga relatif masih rendah yaitu sebesar 56,77%. Untuk daerah Rupat merupakan daerah dengan tingkat ketersediaan layanan operator yang paling rendah karena lokasinya berada di daerah terluar jauh dari pusat ibu kota dan pusat ekonomi wilayah.

Tabel 5.  
Klasifikasi Variabel Dimensi TIK Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Variabel Dimensi TIK	Dataran		Pesisir		Pulau Bengkalis		Pulau Rupat		Total	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
<b>BTS</b>										
Tinggi ≥ 5 BTS	7	16.28	6	17.65	3	5.56	0	0.00	16	10.32
Sedang ≥ 3 - < 5 BTS	14	32.56	7	20.59	1	1.85	4	16.67	26	16.77
Rendah < 3 BTS	22	51.16	21	61.76	50	92.59	20	83.33	113	72.90
<b>Layanan Operator</b>										
Tinggi ≥ 4 Operator	19	44.19	2	5.88	9	16.67	0	0.00	30	19.35
Sedang ≥ 3 - < 4 Operator	14	32.56	9	26.47	13	24.07	1	4.17	37	23.87
Rendah < 3 Operator	10	23.26	23	67.65	32	59.26	23	95.83	88	56.77
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>155</b>	<b>100</b>

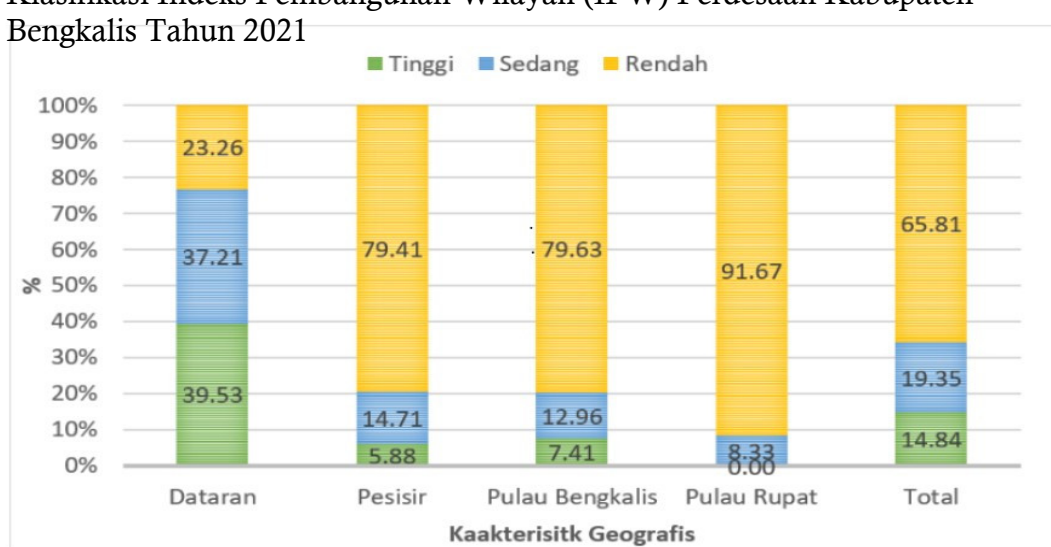
Indeks Komposit Perkembangan Wilayah

Indeks komposit perkembangan wilayah (IPW) merupakan hasil dari perhitungan sejumlah dimensi sebelumnya setelah dilakukan standarisasi data.

Nilai IPW menunjukkan bahwa tingkat perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis masih didominasi dengan tingkat perkembangan rendah sebesar 65,81%, sedang 19,35% dan tinggi 14,84% lihat Gambar 2. Hasil ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan terjadi pada setiap wilayah sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian (Hartati 2022; Warda et al. 2018) terkait dengan adanya ketimpangan antar wilayah. Dilihat dari teori konvergensi seharusnya wilayah yang lebih miskin akan cenderung tumbuh lebih cepat untuk mengejar ketertinggalannya asalkan adanya kebijakan yang lebih merata dalam hal distribusi sumberdaya, infrastruktur dan pembangunan ekonomi sehingga terjadi keterkaitan spasial yang akan mendorong proses percepatan perkembangan pada wilayah yang kurang berkembang sehingga dapat tercipta pemerataan wilayah (Fahmi 2016). Namun, sebaliknya jika wilayah perdesaan khususnya daerah pesisir, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupid di Kabupaten Bengkalis terus terkendala oleh keterbatasan infrastruktur atau aksesibilitas, akses pasar, dan teknologi maka akan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah perdesaan sebagaimana teori divergen bekerja.

Gambar 2.

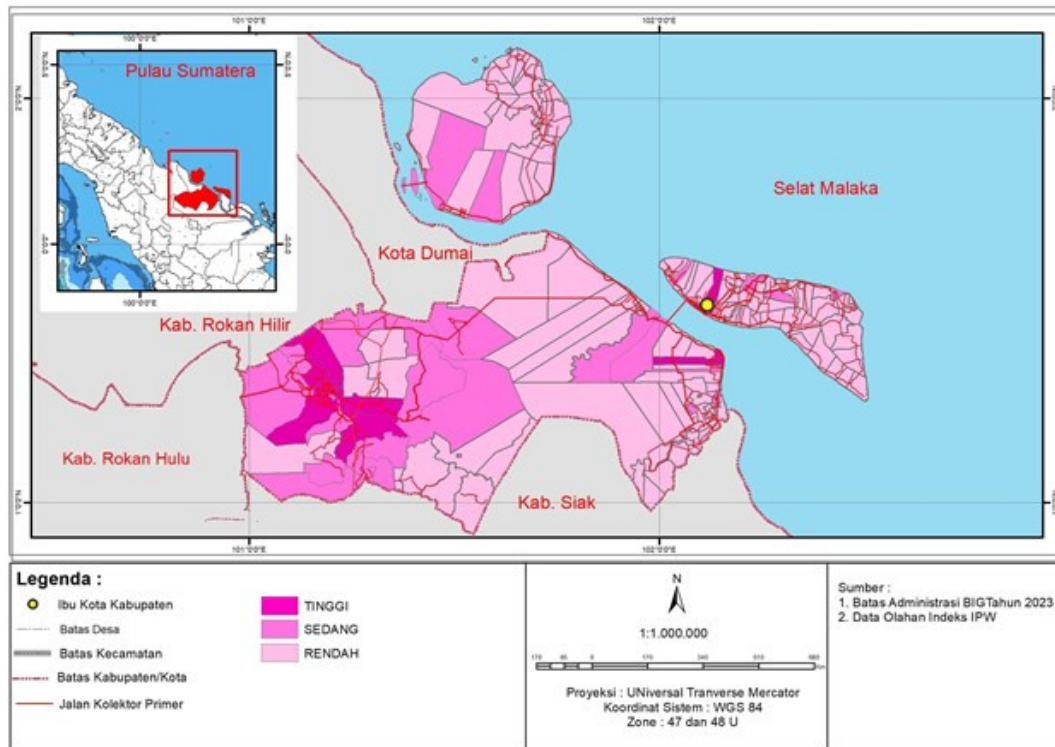
Klasifikasi Indeks Pembangunan Wilayah (IPW) Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021



Dilihat dari variasi persebarannya terlihat bahwa desa-desa yang terletak di daerah dataran tingkat perkembangannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga wilayah lainnya atau dengan kata lain bahwa tingkat perkembangan wilayah perdesaan yang tinggi masih terpusat di daerah dataran lihat Gambar 3. Desa-desa yang terletak didaerah dataran cenderung

lebih tinggi karena adanya sumberdaya minyak bumi di daerah Duri. Selain itu daerah daratan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap infrastuktur, akses fasilitas pelayanan dan sumberdaya manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian Muta'ali (2012) yang menemukan bahwa desa-desa yang terletak di daerah daratan tingkat perkembangannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan untuk daerah pesisir, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat cenderung kurang berkembang karena berkaitan dengan kendala aksesibilitas dimana untuk mencapai kedua wilayah tersebut harus menggunakan penyeberangan kapal yang masih terbatas oleh jumlah dan waktu operasional kapal.

Gambar 3.  
Tingkat Perkembangan Wilayah Perdesaaan di Kab. Bengkalis Tahun 2021



### Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Perkembangan Wilayah

Dari beberapa faktor yang diturunkan dari berbagai dimensi yaitu dimensi kependudukan, dimensi fasilitas pelayanan, dimensi ekonomi, dan dimensi TIK memperlihatkan bahwa tidak semua faktor menentukan perkembangan wilayah secara signifikan. Dari hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan jumlah operator selular yang dapat menjangkau adalah faktor-faktor yang

menentukan secara signifikan terhadap perbedaan tingkat perkembangan wilayah pada empat karakteristik geografis tersebut sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6.  
Variabel Enteres/Removed<sup>a,b,c,d</sup>

Step	Entered	Wilks' Lambda											
		Statistic	df1	df2	df3	Exact F				Approximate F			
						Statistic	df1	df2	Sig.	Statistic	df1	df2	Sig.
1	pertumbuhan penduduk	.426	1	3	151	67.829	3	151	.000				
2	kepadatan penduduk	.358	2	3	151	33.526	6	300	.000				
3	Jumlah operator	.314	3	3	151					24.57	9	362.8	.000

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.

a. Maximum number of steps is 16.

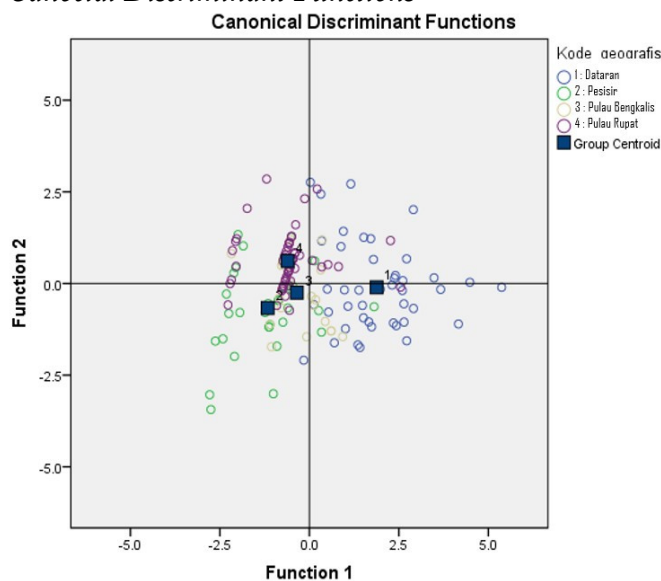
b. Minimum partial F to enter is 3.84.

c. Maximum partial F to remove is 2.71.

d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Penduduk seringkali menjadi indikator potensi pasar pendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi baik industri maupun publik. (Walad 2008) juga menemukan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah variabel penduduk. Di sisi lain keberadaan sinyal operator selular dapat membuka akses yang lebih luas untuk informasi dan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan produktifitas dan konektivitas antar wilayah (Djauhari 2011; Saputra, Handra, and Primayesa 2021).

Gambar 4.  
Canocial Discriminant Functions



Dilihat dari Gambar 4 terlihat jelas bahwa tingkat perkembangan wilayah dataran memiliki jarak yang paling jauh terhadap wilayah lain atau dapat dikatakan bahwa tingkat perkembangan perdesaan di wilayah dataran berbeda atau lebih berkembang dibandingkan dengan tingkat perkembangan wilayah perdesaan di daerah pesisir, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rupat. Gambaran ini menunjukkan bahwa kondisi geografis mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Bengkalis.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variasi perbedaan tingkat perkembangan wilayah perdesaan yang terletak di dataran, pesisir, pulau bengkalis dan pulau Rupat. Tingkat perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis masih dominan rendah dengan persentase 65,81 %, sedang 19,35 % dan tinggi 14,84 %. Distribusi tingkat perkembangan wilayah perdesaan dengan kategori tinggi masih dominan di daerah dataran sedangkan daerah pesisir, pulau Bengkalis dan Rupat tingkat perkembangan wilayahnya masih tergolong rendah atau belum berkembang. Faktor-faktor yang menentukan secara signifikan terhadap perbedaan perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis adalah kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan jumlah layanan operator selular yang dapat menjangkau.

Diperlukan upaya perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan daerah pesisir dan pulau kecil. Upaya peningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta meningkatkan pemerataan distribusi penduduk dan penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih banyak khususnya daerah pesisir dan pulau kecil diharapkan dapat untuk mengurangi tingkat kesenjangan perkembangan wilayah di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini masih terbatas dalam penggunaan data yang dianalisis maka diperlukan data-data lain yang lebih komprehensif yang dapat menggambarkan secara detail tingkat perkembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bengkalis.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terimakasih semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini. Terimakasih khususnya saya sampaikan kepada pembimbing yang telah berkenan memberikan saran kritik terhadap perbaikan penelitian

### Daftar Pustaka

- Amin, Nurul. 2015. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4(1).
- Artelaris, Panagiotis. 2022. "A Development Index for the Greek Regions." *Quality & Quantity* 56(3):1261–81. doi: 10.1007/s11135-021-01175-x.
- BPS. 2011. *Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional*. Jakarta.
- BPS. 2023. *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka*. Bengkalis.
- Budiharjo, Eko. 1995. "Tata Ruang Pembangunan Daerah."
- Clelland, David. 2022. "New Regions in the Periphery: Agency and Politics in Shaping the Governance of Regional Development in the Scotland–England Border Region." *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit* 37(6):421–39. doi: 10.1177/02690942231169519.
- Deng, Xiangzheng, Li Liang, Feng Wu, Zhenbo Wang, and Shujin He. 2022. "A Review of the Balance of Regional Development in China from the Perspective of Development Geography." *Journal of Geographical Sciences* 32(1):3–22. doi: 10.1007/s11442-021-1930-0.
- Djauhari, Marhum. 2011. "Pemberdayaan Infrastruktur TIK Dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat Miskin Di Perdesaan." *Buletin Pos Dan Telekomunikasi* 9(1):1–22.
- Fahmi, Anisa. 2016. "Pengaruh Infrastruktur Dan Keterkaitan Spasial Terhadap Konvergensi Beta Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13(1):87. doi: 10.22219/jep.v13i1.3694.
- Feng, Dedong, Yanfeng Jiang, Hualou Long, and Yingqian Huang. 2024. "Spatio-Temporal Patterns and Correlation Effects of Regional Rurality and Poverty Governance Change: A Case Study of the Rocky Desertification Area of Yunnan-Guangxi-Guizhou, China." *Habitat International* 146:103044. doi: 10.1016/j.habitatint.2024.103044.
- Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson. 2013. *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education Limited.
- Hartati, Yuniar Sri. 2022. "Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14(2):19–29.
- Latifah, Lailatul. 2018. "Ketimpangan Wilayah Antar Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2016."
- Murray, Alan T. 2024. "A Location Analytics Perspective of Regional Science at a Crossroad." *Papers in Regional Science* 103(4):100034. doi: 10.1016/j.pirs.2024.100034.
- Muta'ali, Ali. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah. Tata Ruang Dan Lingkungan*, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.

- Muta'ali, Luthfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Noviyanti, Dian, A. Emma Pravitasari, and Sahara Sahara. 2020. "Analisis Perkembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat Untuk Arah Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan." *Jurnal Geografi* 12(01):280.
- Panca Kurniasih, Erni. 2015. "Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznet."
- Pascariu, Gabriela Carmen, Karima Kourtit, and Ramona Tiganasu. 2020. "Regional Development, Spatial Resilience and Geographical Borders." *Regional Science Policy & Practice* 12(5):749–54. doi: 10.1111/rsp3.12351.
- Qin, Xianhong, Yehua Dennis Wei, Yangyi Wu, and Xu Huang. 2023. "Regional Development And Inequality Within City Regions: A Study Of The Yangtze River Delta, China." *Geographical Review* 113(3):359–85. doi: 10.1080/00167428.2021.2021780.
- Ridwan, Ridwan, and Nasar Baso. 2017. "Perencanaan Pembangunan Daerah."
- Rosmeli, Rosmeli, and Nurhayani Nurhayani. 2014. "Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 3(1):456–63. doi: 10.22437/jmk.v3i1.1861.
- Saputra, Rhio Eka, Hefrizal Handra, and Elvina Primayesa. 2021. "Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalandan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Terhadap Pembangunan Manusia Di Wilayah Timur Indonesia." *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 7(1).
- Syafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Tomaney, John. 2014. "Region and Place I: Institutions." *Progress in Human Geography* 38(1):131–40. doi: 10.1177/0309132513493385.
- Walad, M. 2008. "Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Grobogan." *Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Wang, Yang, Chuanglin Fang, Chunliang Xiu, and Daqian Liu. 2012. "A New Approach to Measurement of Regional Inequality in Particular Directions." *Chinese Geographical Science* 22:705–17.
- Warda, Nila, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Nurbani, and Ridho Al Izzati. 2018. "Dinamika Ketimpangan Dan Penghidupan Di Perdesaan Indonesia, 2006–2016." *The SMERU Research Institute*.
- Wei, Yehua Dennis. 2015. "Spatiality of Regional Inequality." *Applied Geography* 61:1–10. doi: 10.1016/j.apgeog.2015.03.013.
- Wenda, Eiron, Jane Tambas, and Leonardus R. Rengkung. 2023. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018-2021 (Analysis of Development Inequality and Economic Growth Between Regions Regency/City in Papua Province 2018-2021)." *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)* 4(3):256–64. doi: 10.35791/agrirud.v4i3.44912.